

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu reformasi kelembagaan paling fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi 1998. Kebijakan ini secara resmi diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Reformasi tersebut bertujuan memperkuat otonomi daerah, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik, serta mempercepat pembangunan daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal.

Secara teoretis, desentralisasi fiskal berakar pada teori fiscal federalism yang menekankan keunggulan pemerintah daerah dalam memahami preferensi masyarakat setempat sehingga mampu menyediakan barang dan jasa publik secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat (Oates, 1972). Pandangan ini diperkuat oleh Tiebout (1956) yang menyatakan bahwa kompetisi antardaerah dalam penyediaan

publik dapat mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Dengan



demikian, desentralisasi fiskal secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, literatur empiris mutakhir menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat tidak bersifat linier dan tidak selalu menghasilkan dampak positif. Canavire-Bacarreza et al. (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal hanya berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila didukung oleh kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola yang memadai. Kyriacou et al. (2020) bahkan menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memperlebar disparitas regional apabila terdapat ketimpangan kapasitas fiskal dan administratif antardaerah. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada mekanisme transmisi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Dalam konteks negara berkembang, Nguyen dan Anwar (2021) menegaskan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat umumnya bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi serta dinamika investasi. Oleh karena itu, analisis yang hanya berfokus pada pengaruh langsung berpotensi menghasilkan kesimpulan yang parsial dan kurang mencerminkan kompleksitas hubungan antarkomponen pembangunan.

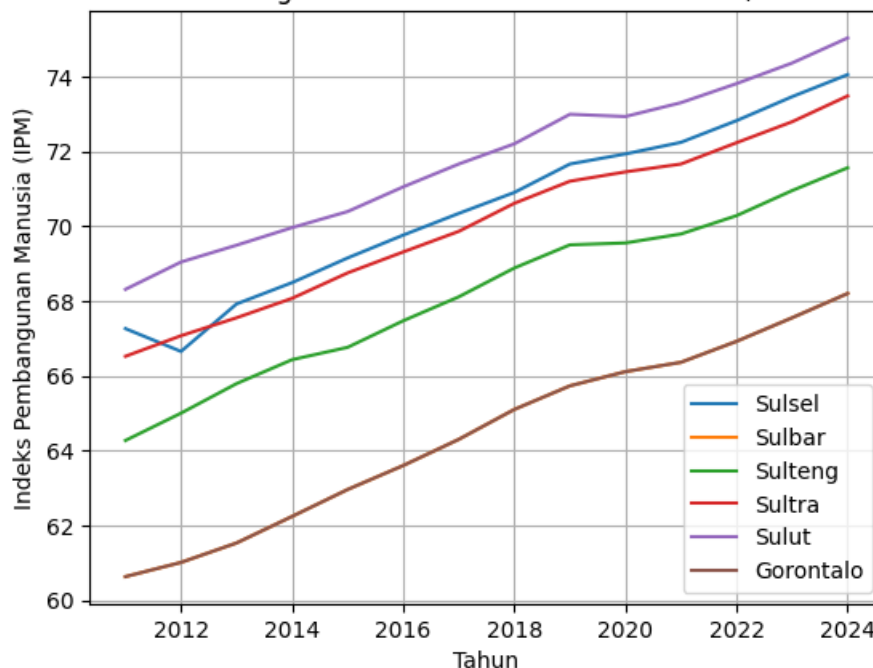


i Indonesia, penelitian awal pasca-otonomi daerah menunjukkan desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah (Adi, 2006; Saragih, 2003). Namun, studi yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Siregar dan Wardhani (2021) menemukan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih berdampak pada peningkatan belanja daerah dibandingkan perbaikan indikator kesejahteraan. Putri et al. (2022) serta Yuliani et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal dan kapasitas fiskal daerah berpengaruh terhadap IPM, namun pengaruh tersebut sangat bergantung pada kualitas belanja dan struktur ekonomi daerah.

Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang sangat relevan untuk mengkaji dinamika tersebut secara lebih mendalam. Kawasan ini terdiri atas enam provinsi dengan karakteristik geografis, demografis, dan struktur ekonomi yang heterogen. Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan manusia dan ketergantungan fiskal yang tinggi.





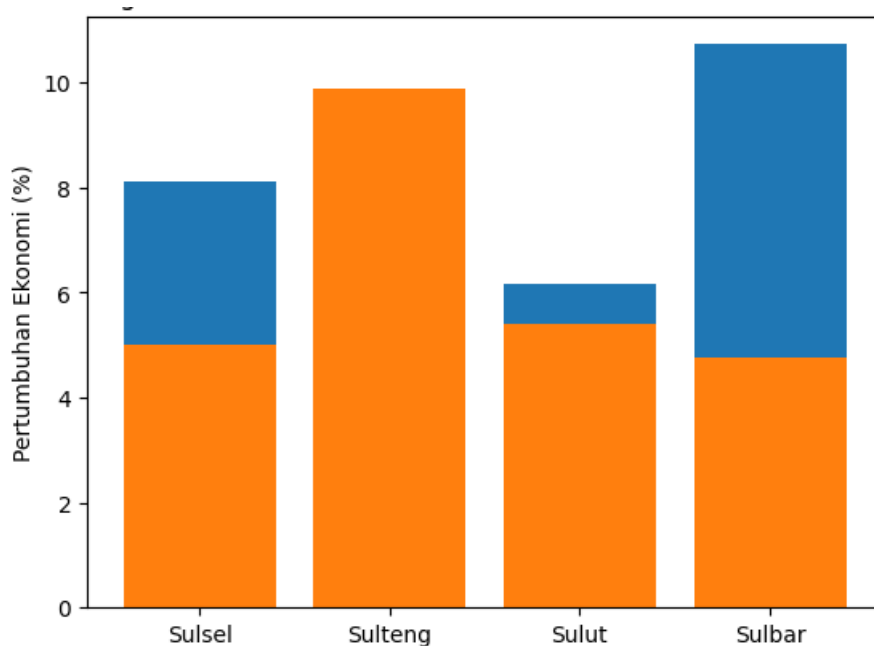
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS, 2025)

Gambar 1.1 Perkembangan IPM Provinsi di Sulawesi (2011-2014)

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan IPM di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi selama periode 2011–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, peningkatan tersebut berlangsung dengan laju dan level capaian yang berbeda-beda antardaerah. Sulawesi Utara secara konsisten mencatat IPM tertinggi, meningkat dari 68,31 pada tahun 2011 menjadi 75,03 pada tahun 2024. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat dan Gorontalo, meskipun mengalami peningkatan IPM, masih berada pada kategori IPM sedang dengan capaian sebesar 68,20 pada tahun 2024. Sulawesi Selatan pusat aktivitas ekonomi kawasan mencatat IPM sebesar 74,05 tahun 2024, namun tetap berada di bawah Sulawesi Utara. Fenomena



ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia di Sulawesi mengalami kemajuan secara agregat, disparitas antardaerah tetap persisten dan tidak menunjukkan kecenderungan konvergensi yang kuat dalam jangka panjang.



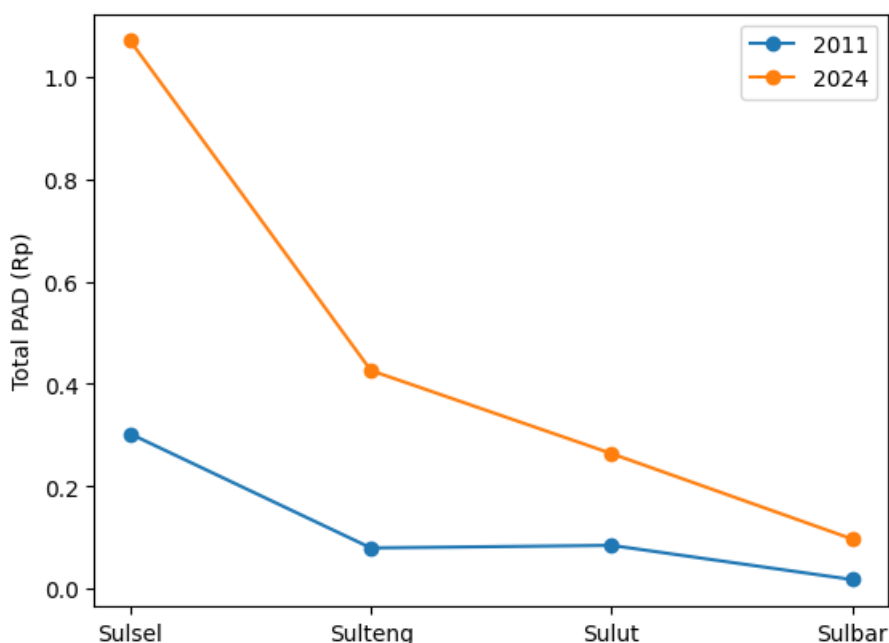
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS, 2025)

Gambar 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sulawesi (2011-2014)

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, data PDRB riil menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi mengalami dinamika pertumbuhan yang relatif tinggi dan fluktuatif. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada beberapa periode, bahkan mencapai dua digit, terutama didorong oleh sektor pertambangan. Namun, capaian IPM provinsi tersebut tidak menjadi tertinggi di kawasan. Sebaliknya, Sulawesi Utara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih moderat justru mencatat IPM



tertinggi secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*growth-welfare disconnect*), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya ditransmisikan menjadi pembangunan manusia yang inklusif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS, 2025)

Gambar 1.3 Kenaikan Total PAD Provinsi di Sulawesi (2011-2014)

Dari perspektif fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi-provinsi Pulau Sulawesi menunjukkan peningkatan signifikan selama lebih dari satu dekade terakhir. Namun, peningkatan kapasitas fiskal tersebut tidak secara konsisten diikuti oleh peningkatan belanja modal yang proporsional. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja non-



, sehingga ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk investasi publik yang berdampak langsung terhadap pengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup

masyarakat. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas desentralisasi fiskal dan menciptakan fenomena *fiscal illusion* (Bahl & Linn, 1992).

Selain faktor fiskal dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional dan investasi merupakan saluran penting dalam mekanisme transmisi pembangunan regional. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas, sementara perdagangan internasional memperluas akses pasar dan mendorong efisiensi melalui spesialisasi (Grossman & Helpman, 1991). Namun, literatur empiris mutakhir menunjukkan bahwa manfaat perdagangan dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada struktur ekonomi dan kualitas institusi. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan investasi berbasis ekstraksi sumber daya alam cenderung menghasilkan pertumbuhan yang kurang inklusif dan memiliki dampak terbatas terhadap pembangunan manusia (Zhang & Zhou, 2021; Adeleye et al., 2023).

Dalam konteks Sulawesi, struktur perdagangan masih didominasi oleh komoditas primer dengan nilai tambah rendah, sementara investasi cenderung terkonsentrasi secara sektoral dan spasial. Paddu et al. (2024) menunjukkan bahwa investasi berbasis sumber daya alam di Sulawesi memiliki spillover effect yang relatif rendah terhadap pembangunan manusia. Kondisi ini semakin memperkuat argumen bahwa perdagangan stasi tidak dapat diperlakukan sebagai faktor eksogen yang berdiri



sendiri, melainkan berinteraksi erat dengan kebijakan fiskal daerah dan kualitas pembangunan manusia.

Keseluruhan fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, investasi, dan kesejahteraan masyarakat bersifat saling memengaruhi dan kompleks. Namun, sebagian besar penelitian empiris di Indonesia masih menggunakan pendekatan agregat dan cenderung menganalisis hubungan tersebut secara parsial, sehingga belum mampu menangkap heterogenitas regional dan mekanisme transmisi pembangunan secara utuh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian hubungan antara desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks regional yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian, khususnya Pulau Sulawesi sebagai bagian dari kawasan Indonesia Timur. Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia umumnya menggunakan pendekatan nasional atau agregat provinsi, sehingga kurang mampu menangkap heterogenitas karakteristik fiskal dan ekonomi antardaerah (Siregar & Wardhani, 2021). Dengan menyoroti wilayah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi dan struktur ekonomi berbasis sumber daya alam, penelitian ini memberikan perspektif empiris yang lebih kontekstual.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan dimensi kebijakan fiskal dengan faktor-faktor ekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi, i, dan perdagangan internasional, untuk memahami mekanisme



transmisi kebijakan fiskal terhadap pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Pendekatan ini melengkapi temuan literatur empiris yang menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada struktur ekonomi serta kualitas institusi daerah (Canavire-Bacarreza et al., 2020; Kyriacou et al., 2020).

Dengan memanfaatkan data jangka panjang dan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kesejahteraan, penelitian ini juga memberikan bukti empiris baru mengenai ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kaya sumber daya alam, sebagaimana diindikasikan dalam studi perdagangan dan pembangunan manusia di negara berkembang (Zhang & Zhou, 2021; Adeleye et al., 2023). Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia, sekaligus memberikan implikasi kebijakan yang lebih relevan bagi pembangunan daerah di kawasan Indonesia Timur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penting untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam pengaruh Serapan Anggaran, Belanja Modal, Kapasitas Fiskal, Investasi, dan Tingkat Kecenderungan Konsumsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat (yang diprosikan dengan Indeks Pembangunan Manusia) di provinsi-



yang ada di Pulau Sulawesi, dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) sebagai variabel mediasi.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap IPM di Provinsi Sulawesi, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Serapan Anggaran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
2. Apakah Serapan Anggaran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
5. Apakah Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?



Apakah Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui

Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?

7. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
8. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
9. Apakah Tingkat Kecenderungan Konsumsi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?
10. Apakah Tingkat Kenderungan Konsumsi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh serapan anggaran terhadap kesejahteraan baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan Perdagangan Internasional (ekspor-impor) pada Provinsi di Pulau Sulawesi.



2. Untuk menganalisis pengaruh serapan anggaran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.
3. Untuk menganalisis pengaruh elanja modal terhadap terhadap Kesejahteraan baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada Provinsi di Pulau Sulawesi.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.
5. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap Kesejahteraan baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada Provinsi di Pulau Sulawesi
6. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.
7. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap Kesejahteraan baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada Provinsi di Pulau Sulawesi



8. Untuk menganalisis pengaruh investasi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.
9. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kecenderungan konsumsi terhadap Kesejahteraan baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada Provinsi di Pulau Sulawesi
10. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kecenderungan konsumsi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang akan memberi manfaat yang terkait secara langsung dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teotiris

Memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoritis keilmuan dan bidang ilmu yakni pemahaman secara makro dan mikro keterkaitan

ra Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi



Khusus, Belanja Modal, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah daerah terkhusus pada Provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi, dapat membantu dalam mengambil kebijakan dalam membantu memajukan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan sebagai realisasi peningkatan ekonomi daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun menjadi gap penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan penelitian yang relevan terkhusus penelitian pada Provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas fiskal, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Oates, 1993).

Dalam teori *fiscal federalism*, Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi mengenai preferensi masyarakat lokal, sehingga lebih efektif dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pandangan ini diperkuat oleh teori Tiebout (1956) yang menyatakan bahwa persaingan antarpemerintah daerah dalam sistem desentralisasi dapat mendorong efisiensi layaknya mekanisme pasar.

Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola fiskal daerah. Prud'homme (1995) memperingatkan bahwa desentralisasi yang tidak disertai mekanisme pengawasan dan redistribusi yang memadai berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah. Studi Enikolopov dan Kalyanaram (2007) serta Kyriacou et al. (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, desentralisasi fiskal yang tidak disertai dengan kebijakan yang tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal harus disertai dengan kebijakan yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



kesejahteraan hanya muncul ketika didukung oleh institusi yang kuat dan akuntabel.

Dalam konteks Indonesia, Ahmad dan Mansoor (2002) serta Lewis (2005) menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan belanja daerah secara signifikan, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan publik. Lewis (2005) mengungkapkan bahwa pasca desentralisasi, belanja daerah meningkat signifikan, namun belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik. Studi oleh Martinez-Vazquez dan McNab (2003) juga mendukung gagasan bahwa desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat efisiensi alokasi sumber daya. Namun, Prud'homme (1995) memperingatkan adanya risiko kesenjangan antar daerah yang semakin melebar bila desentralisasi dilakukan tanpa mekanisme redistribusi yang efektif. Araştırma oleh Boex et al. (2006) menyimpulkan bahwa desentralisasi yang diiringi dengan kebijakan fiskal yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dapat menghasilkan efek positif pada kesejahteraan masyarakat. Enikolopov dan Zhuravskaya (2007) menekankan pentingnya integrasi antara struktur politik dan desentralisasi fiskal dalam memastikan efektivitasnya.

Tiebout (1956) dalam teorinya menyatakan bahwa persaingan antar pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dapat menciptakan seperti pasar. Sofilda et al. (2023) menekankan pentingnya angan antara otonomi fiskal dan kontrol pusat untuk menjamin



pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan prasyarat, namun bukan jaminan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Masyarakat sebagai sasaran penerima kesejahteraan harus mendukung upaya pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab atas peningkatan kesejahteraan masyarakat (Busemeyer & Iversen, 2020; Fritz & Koch, 2019; Ottelin et al., 2018).

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup warga. Dalam pendekatan ekonomi pembangunan, kesejahteraan mencakup aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial (Ranis et al., 2000).

Sepulveda dan Martinez-Vazquez (2011) meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan, dan menemukan bahwa efek positif hanya muncul jika ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.



Cantarero dan Pascual (2008) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Spanyol berpengaruh positif terhadap hasil kesehatan masyarakat sebagai bagian dari indikator kesejahteraan.

Booth (2003) menyampaikan bahwa di Indonesia, desentralisasi belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan karena distribusi dana ke daerah belum sesuai dengan kebutuhan aktual. Javed dan Qaderi (2013) menemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dan angka harapan hidup di Pakistan, yang memperlihatkan relevansi antara kebijakan fiskal dan kesejahteraan. Menurut studi Araştırma Makalesi (2021), indeks pembangunan manusia (IPM) dapat meningkat jika pemerintah daerah memiliki kontrol atas anggaran pendidikan dan kesehatan. White dan Smoke (2005) menyarankan agar desentralisasi dilengkapi dengan pelatihan dan penguatan kapasitas agar pelayanan publik di daerah meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan.

Alm, Aten dan Bahl (2001) menyatakan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui desentralisasi adalah koordinasi antar level pemerintahan. Lewis dan Chakeri (2004) menilai bahwa pengeluaran pembangunan di daerah pasca desentralisasi cenderung tidak konsisten, yang membatasi dampak positifnya pada kesejahteraan masyarakat. Hill (2008) menyebutkan bahwa ketimpangan dalam kesejahteraan juga disebabkan oleh globalisasi dan kemampuan daerah terhadap perubahan ekonomi eksternal.



World Bank (2007) menegaskan pentingnya perencanaan pengeluaran publik di daerah yang diarahkan pada pelayanan dasar untuk memastikan pemerataan kesejahteraan. Brodjonegoro (2006) menyimpulkan bahwa revisi regulasi desentralisasi di Indonesia harus menjawab tantangan dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera (Diego-Rosell et al., 2018; Stucki & Bickenbach, 2019; Von Heimburg & Ness, 2021)

Kesejahteraan merupakan salah satu konsep dalam ilmu ekonomi yang sering menjadi bahan kajian dan penelitian. Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya mengadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*, bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. bahwa



memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya (Newbert, 2020; Matson, 2022; Steeds, 2022).

Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Pencapaian tingkat kepuasan inilah yang menjadi kajian ilmu ekonomi. Berbagai pendekatan dapat menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga dapat dikatakan "sejahtera" atau "puas", diantaranya adalah pendekatan marginality, utility, efisiensi pasar, dan opportunity cost (Chau & Rásonyi, 2019; Groom & Maddison Pr., 2019; Li & Hsee, 2021).

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan, yaitu pendekatan teori lingkungan manusia (*human ecological system theory*), teori sumber daya (*resources theory*), dan teori perilaku (*facet theory behavioral*). Pendekatan *human ecological* menekankan interaksi dan ketergantungan manusia dengan lingkungan fisik, biologis, dan sosial, termasuk transformasi energi dan sumber daya informasi. Dalam teori sumber daya, kesejahteraan keluarga diukur berdasarkan kenyamanan, informasi yang diperoleh, serta kepemilikan uang, barang, dan jasa. Sementara itu, teori *facet* mengukur kesejahteraan keluarga melalui berbagai skala yang didasarkan pada persepsi individu dalam keluarga tentang kesejahteraan mereka (Cooper et al., 2023; Guo et al., 2020; L. Wang et al., 2024).

Pendekatan *marginality*, lebih cenderung menekankan pada upaya angga menambah unit barang dan jasa yang dikonsumsi untuk tinggi kesejahteraan, setiap penambahan satu unit barang dan



jasa yang dihabiskan kegunaannya maka akan bertambah kepuasan seseorang sampai pada titik tertentu. Termasuk juga pada perilaku produsen, setiap input yang ditambahkan akan meningkatkan produk yang akan dihasilkan sehingga sampai pada titik tertentu (Herfeld, 2021; Lewbel et al., 2022; Tsiaplias, 2021).

Pendekatan efisiensi pasar cenderung menekankan bagaimana pasar dapat menciptakan surplus produsen dan surplus konsumen. Kepuasan atau kesejahteraan rumah tangga, khususnya pada konsumen, dapat diukur melalui surplus konsumen, yaitu nilai lebih yang diterima konsumen dari suatu barang yang dibeli melebihi dari harga yang mampu mereka bayar, atau ketika harga pasar lebih rendah dibandingkan daya beli konsumen. Di sisi lain, produsen memperoleh surplus ketika nilai lebih yang diterima dari suatu produk melebihi biaya oportunitas yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Surplus ini mencerminkan seberapa besar produsen bersedia membayar untuk mendapatkan hak menjual suatu produk pada harga pasar yang berlaku. Dalam pendekatan utilitas, kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh anggaran yang dimiliki; semakin tinggi garis anggaran, semakin besar kemungkinan kepuasan rumah tangga dalam melakukan konsumsi (Becher et al., 2019; X. Fan et al., 2020; Scott & Sesmero, 2022).

Dalam konteks lokal di Indonesia, kesejahteraan didefinisikan tiga pengertian utama: pertama, kesejahteraan subjektif, yaitu perasaan seseorang yang mencakup rasa sejahtera, bahagia,



dihormati, diakui, serta perasaan kekurangan atau kemiskinan. Kedua, kesejahteraan inti, yang terdiri dari kebutuhan dasar baik material maupun non-material, termasuk gizi, kesehatan, pengetahuan, dan kekayaan materi. Ketiga, lingkungan pendukung, yaitu lingkungan kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan inti dan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang (Agustina et al., 2019; Rahman et al., 2022; Zuhdi & Syarief, 2023).

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Dalam hal ini (Dartanto et al., 2020) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebihbaik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat

menengah kebawah.



Todaro, secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan berikut: $W = W(Y, I, P)$, dimana Y adalah pendapatan perkapita, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolute. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda-beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan dinegara-negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan Masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negative dengan kemiskinan (Amin et al., 2020; Decerf, 2021).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum merupakan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Bachtiar, 2022; Rahmatul Putra et al., 2023).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator silan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu omian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam



perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Cook et al., 2022; Kalimeris et al., 2020; Mohamed et al., 2022).

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital (Boianovsky, 2020; Fazzari et al., 2020; Nah & Lavoie, 2019).

Berikut ini beberapa pengertian Pertumbuhan Ekonomi oleh beberapa Ahli :

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan

Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah (Koop et al., 2020; Song et al., 2020)



Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Casey et al., 2023; Matsuki, 2019)

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Coşkun et al., 2020; Sukharev, 2019; Tambovtsev, 2019).

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Doan, 2019; Donou-Adonsou et al., 2021;

ng & Cha, 2021).



Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal, Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Dwumfour, 2020; Ferguson, 2020; Q. Jiang, 2020).

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya antara lain, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selajutnya akan

banyak jumlah angkatan kerja dan kemajuan teknologi (Arrafia & Artino, 2022; Cheng, 2020; Kulkarni, 2020)



Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif (Capello & Cerisola, 2021; Liu et al., 2018; Plakhin et al., 2023).

Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Bao & Chai, 2022; Lentz, 2020). Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu



1 politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan mewujudkan tujuan nasional.

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Rahardjo Adisasmita dalam bukunya, mencakup beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Salah satu indikator tersebut adalah ketidakseimbangan pendapatan. Dalam keadaan ideal, pendapatan didistribusikan secara adil, di mana 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas akan menerima 20 persen dari total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi menengah, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, perubahan struktur perekonomian juga merupakan salah satu indikator yang relevan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah (H. Jung et al., 2018; Odusanya & Akinlo, 2020)

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Oates (1999) mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan sistem fiskal yang mendukung efisiensi dan inovasi.

Martinez-Vazquez dan McNab (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan cepat pengambilan keputusan lokal yang adaptif terhadap an ekonomi setempat.



Thiessen (2003) membuktikan bahwa di negara-negara maju, desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Woller dan Phillips (1998) dalam studi lintas negara berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan kombinasi antara otonomi fiskal dan mekanisme pengawasan yang kuat. Akai dan Sakata (2002) mendukung argumen bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya lokal.

Menurut Sinn (1997), persaingan antardaerah dalam sistem desentralisasi dapat mendorong reformasi ekonomi dan efisiensi dalam alokasi anggaran. Yilmaz (1999) menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan desentralisasi dalam mendorong pertumbuhan.

Barrios dan Strobl (2009) menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan regional juga menjadi aspek penting dalam memahami pertumbuhan ekonomi dalam konteks desentralisasi. Eckardt (2008) menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas politik lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas layanan publik. Limi (2005) menyatakan bahwa efek desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berbeda antar wilayah tergantung pada struktur ekonomi lokal dan kelembagaan fiskal.



esosudarmo et al. (2009) menegaskan perlunya model regional untuk menyusun kebijakan pertumbuhan yang lebih merata

di Indonesia. Sofilda et al. (2023) kembali menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal angka, melainkan sejauh mana pertumbuhan itu mampu mendorong pembangunan manusia dan menurunkan ketimpangan antar daerah.

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri (Jayadevan, 2018; Khosla & Bawa, 2018; Schlogl & Sumner, 2020).

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional)

tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Habibah et al., 2022; Jamolov, 2021; Rana et al., 2020).

Pendekatan produksi PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB , kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut Nilai Tambah Bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha (Hurnyak et al., 2021; Kenneth & Onyedikachi, 2021; Russkova et al., 2022).

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)



menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung (Fatoureh Bonab, 2019; Higo et al., 2023; Zavgorodniy, 2023).

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber



dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Pattilouw, 2023; Rahmatul Putra et al., 2023; van den Boogaard & Santoro, 2022).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Ratnawati et al., 2023; Rumerung et al., 2024; Wujarso et al., 2022).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah harus diarahkan pada peningkatan kesadaran wajib pajak, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan PAD. Sabir. (2017).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah



merupakan sumber sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam mebiayai pembangunan daerah (Gordon et al., 2020; Kurniawan, 2022; Sri Rizky et al., 2023). Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari :

a) Pajak hotel, b) Pajak restoran dari rumah makan, c) Pajak hiburan, d) Pajak reklame, e) Pajak penerangan jalan, f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas.penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah dang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan dengan



kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum.

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima

oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017).



Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah, b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari :

(1) Retribusi jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut :

- (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu, (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, (c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan, (f) Retribusi



tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial, (g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

- (2) Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah :
- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, (b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan, (c) Retribusi tempat pelelangan, (d) Retribusi terminal, (e) Retribusi tempat khusus parkir, (f) Retribusi tempat penginapan, (g) Retribusi penyedotan kakus, (h) Retribusi rumah potong hewan, (i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.



Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b) Jasa giro, c) Pendapatan bunga, d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g) Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, h) Pendapatan denda pajak, i) Pendapatan denda retribusi, j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k) Pendapatan dari pengembalian, l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan



pelatihan, n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007)

Menurut (Hoesein et al., 2022; Negara & Hutchinson, 2021) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan :

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah

2.1.5 Dana Alokasi Umum

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari ran APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan uan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah



dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Khoirunisa & Sulaeman, 2022; Maulana & Susilowati, 2020; Muzdalifah, 2020)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Balio et al., 2024; Gonschorek, 2021; Morphet, 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Peraturan Pemerintah yaitu : Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atar kota sebesar 90% dari total DAU (Ascarya & Masrifah, 2023; Kuzmynchuk et al., 2022; Paliychuk et al., 2020).



ana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai Komponen dari dana ngan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep

kesenjangan fiscal atau celah fiscal. Instrumen untuk mengatasi horizontal inbalance (ketidak seimbangan) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah dan Equalization grant (hibah pemerataan) berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD (Sarwono & Puji Astuti, 2021; Syathi et al., 2020).

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yakni menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah



2005 yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional (Apriliani & Khoirunurrofik, 2020; Azaki & Lutfi, 2023; Kaenong et al., 2023).

Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis

an oleh kementerian Negara/departemen teknis (Moitra et al., 2022).
out et al., 2022).



Dalam upaya peningkatan transparansi dan objektivitas alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada masing-masing daerah provinsi maupun kab/kota maka proses perhitungan DAU terbagi atas : Tahap akademis, tahap ini merupakan tahap persiapan perhitungan alokasi DAU dimana pemerintah ditjen perimbangan keuangan mengundang beberapa wakil perguruan tinggi untuk mengevaluasi formula dan perhitungan DAU. Kedua Tahap Teknis, tahap ini merupakan tahap perhitungan DAU dari pemerintah. Ketiga tahap Administratif, tahap ini merupakan hasil perhitungan DAU yang diperoleh pada tahap teknis. Keempat Tahap politis, pemerintah bersama DPR membahas beberapa alternative hasil simulasi perhitungan DAU yang dilakukan oleh pemerintah pada rapat panitia anggran DPR (Bagepally et al., 2022; Ghazi & Hosseinzadeh Lotfi, 2019).

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.



Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah (SAP) "Belanja modal adalah Pengeluaran

anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan (Arianpoor & Eslami Khargh, 2023; Barker et al., 2022; Manikas et al., 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan belanja modal adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk Pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas asset yang didapat dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun.



Belanja modal dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kategori utama yaitu: Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak kategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan,



termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah Belanja yang mencakup untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud. pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari tahun akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah serta ada 4 jenis kategori belanja modal yaitu: (1) belanja modal peralatan dan mesin, (2) belanja modal gedung dan bangunan, (3) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (4) belanja modal fisik dan lainnya.

2.1.8 Perdagangan Ekspor-Import

Pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Proses ekspor pada umumnya adalah proses transportasi mengeluarkan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, pada umumnya ekspor adalah proses perdagangan atau kegiatan mengeluarkan komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar

ra membutuhkan campur tangan bea cukai di negara pengirim penerima .(Schreiber, 2021; Vandenberghe, 2021; Zongo, 2020)



Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah impor. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut dan udara serta tempat-tempat di Zona Economy Exclusive (ZEE) Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah Sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional (Osano, 2019; Radicic & Djalilov, 2019; Zahoor & Lew, 2023)

Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Definisi Impor Undang-Undang Kepabeanan Indonesia seperti yang dibukukan dalam UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 14 bahwa yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan Serapan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan (Ekspor-Impor) dan IPM

Serapan anggaran berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika pemerintah mampu menyerap anggaran secara optimal, dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan investasi di sektor produktif dapat digunakan secara efektif. Penggunaan anggaran yang tepat waktu dan



tepat sasaran akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Serapan anggaran yang optimal memberikan dorongan langsung kepada perekonomian dengan meningkatkan belanja publik dan konsumsi domestik (Bouakez et al., 2020; S. Fan et al., 2020; Onifade et al., 2019).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efektivitas serapan anggaran. Anggaran yang diserap dengan baik akan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung aktivitas bisnis, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Proyek-proyek ini penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi biaya transportasi, dan memperbaiki akses pasar. Dalam jangka panjang, serapan anggaran yang baik akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur yang dibangun akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi nasional (Chatterjee et al., 2021; Lee, 2021; Valido, 2020).

Perdagangan ekspor-impor juga dipengaruhi oleh serapan anggaran. Ketika pemerintah mampu menyerap anggaran dengan baik, infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan bandara dapat dibangun dan ditingkatkan. Infrastruktur yang baik memfasilitasi aliran barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien, sehingga menurunkan

logistik dan meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar nasional. Serapan anggaran yang optimal pada sektor logistik dan



transportasi memperkuat hubungan perdagangan dan memungkinkan negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan global (Ding et al., 2022; S. A. R. Khan et al., 2019; Tang & Abosedra, 2019).

Ekspor barang dan jasa meningkat seiring dengan serapan anggaran yang baik dalam sektor industri dan logistik. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sektor industri dapat membantu perusahaan-perusahaan lokal meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya. Investasi pemerintah dalam teknologi dan infrastruktur mendukung inovasi dan efisiensi produksi, sehingga produk-produk lokal lebih kompetitif di pasar global. Dengan demikian, serapan anggaran yang efektif berkontribusi langsung pada peningkatan ekspor dan memperkuat posisi negara di pasar internasional (Park, 2020; Roy & Schoenherr, 2022; K. Wang & Tao, 2019)

Impor barang modal dan bahan baku juga diuntungkan oleh serapan anggaran yang baik. Ketika pemerintah dapat mengalokasikan dan menyerap anggaran untuk mendukung sektor industri, proses impor barang-barang modal yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri menjadi lebih efisien. Serapan anggaran yang baik mendukung pembiayaan fasilitas dan infrastruktur yang mempercepat proses impor dan distribusi bahan baku, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas industri nasional. Hal ini menciptakan

angan antara kebutuhan impor dan kapasitas produksi dalam (Abreha, 2019; Huang et al., 2019; Torres Mazzi et al., 2021).



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dipengaruhi oleh serapan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan harus diserap dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serapan anggaran yang efektif memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, seperti akses pendidikan yang lebih luas dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Peningkatan kualitas layanan ini secara langsung meningkatkan indikator-indikator utama IPM, seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita (Herrero et al., 2019; Lind, 2019; Smits & Permanyer, 2019).

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu dampak positif dari serapan anggaran yang baik. Anggaran yang diserap untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengembangan program-program pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terdidik dan berkualitas. Tenaga kerja yang lebih terdidik berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing internasional. Serapan anggaran yang baik dalam sektor pendidikan memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan (L. Chen et al., 2022; Pribadi et al., 2020; D. Zhang et al.,



Kualitas kesehatan masyarakat juga meningkat ketika anggaran kesehatan diserap secara efektif. Pemerintah dapat membangun fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obatan, dan meningkatkan layanan kesehatan yang lebih merata dengan anggaran yang diserap dengan baik. Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya berkontribusi pada IPM, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena masyarakat yang lebih sehat dapat bekerja lebih optimal. Serapan anggaran yang baik dalam sektor kesehatan adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas (Cordero et al., 2021; Moses et al., 2021; Pu, 2021).

Stabilitas ekonomi jangka panjang dapat dicapai melalui serapan anggaran yang baik. Ketika anggaran pemerintah diserap secara optimal, defisit anggaran dapat diminimalisir, dan pemerintah tidak perlu bergantung pada utang luar negeri yang berlebihan. Pengelolaan anggaran yang baik juga memberikan kepastian bagi pasar dan investor bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program ekonominya secara efisien. Hal ini menciptakan stabilitas makroekonomi yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan investor (Reis, 2022; Sakuragawa & Sakuragawa, 2020; Yongding, 2022).

Secara keseluruhan, serapan anggaran yang efektif menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan lapangan kerja. Ketika anggaran pemerintah diserap dengan baik,



dampak positif terasa di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan. Serapan anggaran yang baik menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan, di mana setiap sektor saling memperkuat dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Dengan demikian, serapan anggaran yang optimal menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial di masa depan.

2.2.2 Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan (Ekspor-Impor) dan IPM

Belanja modal oleh pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran ini umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi bisnis. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan efek berlipat yang mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya investasi yang tinggi dalam belanja modal, kapasitas produktif dari suatu negara meningkat, yang kemudian memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Han et al., 2021; Shaddady, 2022; Sturm et al., 1998).

Belanja modal yang diarahkan pada peningkatan teknologi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih signifikan. membangun infrastruktur digital seperti jaringan internet



berkecepatan tinggi atau pusat data, negara dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur, jasa, dan pertanian. Inovasi yang didorong oleh investasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan industri baru dan meningkatkan daya saing global. Di era ekonomi digital, kemampuan suatu negara untuk berinovasi menjadi kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kurantin & Osei-Hwedie, 2019; Kurniawati, 2020)

Belanja modal yang terarah dan berkelanjutan dapat mengurangi ketimpangan regional dalam pembangunan ekonomi. Ketika investasi pemerintah fokus pada daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil, potensi ekonomi daerah tersebut dapat dikembangkan. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan lebih inklusif. Dengan demikian, belanja modal berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan adil di berbagai wilayah, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang (Di Liddo et al., 2019; Luintel et al., 2020; Medeiros et al., 2021).

Belanja modal yang diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur perdagangan, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi, memiliki dampak besar terhadap kinerja perdagangan ekspor

or. Infrastruktur yang lebih baik membantu menurunkan biaya sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk ke pasar



internasional dengan lebih efisien dan harga yang lebih kompetitif. Akibatnya, kemampuan ekspor meningkat karena produk lokal lebih mudah diakses oleh konsumen global. Selain itu, peningkatan infrastruktur juga memungkinkan peningkatan kapasitas perdagangan, memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk domestik (Dunford et al., 2020; Lorz, 2020; Tang & Abosedra, 2019).

Belanja modal pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Ketika belanja modal diarahkan untuk membangun fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan semakin mudah dan merata. Dengan akses yang lebih baik, kualitas pendidikan meningkat, serta layanan kesehatan yang memadai membantu memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kedua sektor ini merupakan komponen utama dalam perhitungan IPM, sehingga peningkatan akses dan layanan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan IPM suatu negara (Giammanco & Gitto, 2019; Mannanal & Rajagopal, 2023; Shafuda & De, 2020).

Belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat



secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi risiko penyakit menular yang sering terjadi di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Peningkatan kualitas hidup ini tercermin dalam komponen IPM, seperti harapan hidup yang lebih tinggi dan kesejahteraan umum yang lebih baik. Dengan demikian, belanja modal yang tepat sasaran berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan sosial dan meningkatkan IPM secara signifikan (Alimi et al., 2020; Ferreira et al., 2021; Ross et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang didukung oleh belanja modal, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perdagangan, baik ekspor maupun impor. Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan dalam negeri memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik, meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ini memungkinkan mereka menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekspor. Infrastruktur yang lebih baik, hasil dari belanja modal pemerintah, juga mengurangi biaya logistik dan mempermudah akses ke pasar global, meningkatkan volume ekspor barang dan jasa (S. A. R. Khan et al., 2020; Park, 2020; Tang & Abosedra, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh belanja modal juga mempengaruhi impor. Dengan ekspansi ekonomi, kebutuhan akan barang modal dan bahan baku dari luar negeri meningkat, mendukung proses

domestik. Dengan infrastruktur yang memadai, impor dapat dilakukan dengan lebih efisien, yang pada akhirnya juga berkontribusi



terhadap peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Hubungan saling menguntungkan antara pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ini menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal memegang peranan penting dalam memperkuat daya saing global suatu negara dan meningkatkan volume perdagangan internasional (Adarov & Stehrer, 2021; Barrows & Ollivier, 2021; Tsokhas, 2022) .

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan membawa dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatnya pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja baru, pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Peningkatan pendapatan ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang menjadi komponen utama dalam IPM. Infrastruktur pendidikan yang baik meningkatkan kualitas pendidikan dan rata-rata lama sekolah, sementara akses terhadap layanan kesehatan yang memadai memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kesejahteraan umum (Munir & Shahid, 2021; Paddu, 2023; Perkins et al., 2021; Smits & Permanyer, 2019).

Peningkatan akses layanan dasar, pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Ketika berbagai lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dalam hal akses pendidikan dan

an dapat diminimalisir. Pertumbuhan yang merata ini akan baiki kualitas hidup secara keseluruhan dan meningkatkan



indikator-indikator pembangunan manusia seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan, yang tercermin dalam IPM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang pada pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Asongu et al., 2020; Barrozo et al., 2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi memberikan dampak langsung terhadap kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar perdagangan global. Negara dengan IPM tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik dan berketerampilan tinggi, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk yang lebih baik ini menjadi faktor penting dalam daya saing ekspor, karena pasar internasional biasanya mengutamakan produk dengan standar kualitas tinggi. Dengan demikian, tingginya IPM meningkatkan potensi ekspor barang-barang yang berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi negara dalam perdagangan internasional (Guasti & Koenig-Archibugi, 2022; B. Jiang & Dai, 2023; Naseer et al., 2019).

Peningkatan IPM juga berkorelasi dengan daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Kualitas hidup yang lebih baik memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap barang-barang konsumsi berkualitas yang diimpor dari luar negeri. Tingginya IPM juga mempengaruhi permintaan terhadap impor barang-barang tertentu yang sesuai dengan kehidupan yang lebih baik. Hubungan ini menciptakan dinamika



perdagangan yang lebih sehat, di mana negara dengan IPM tinggi tidak hanya menjadi eksportir produk-produk unggulan, tetapi juga memiliki pasar domestik yang kuat untuk barang-barang impor (Ahmad et al., 2020; Smits & Permanyer, 2019).

Belanja modal memainkan peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan, dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor strategis melalui belanja modal menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh belanja modal memfasilitasi perdagangan yang lebih kompetitif di pasar global serta meningkatkan kemampuan negara untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan bagi industri domestik

Peningkatan kualitas hidup yang diukur melalui IPM memberikan dampak positif terhadap kapasitas perdagangan suatu negara. Negara dengan IPM tinggi memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan daya beli masyarakat yang lebih tinggi, yang pada akhirnya memperkuat perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara belanja modal, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan IPM membentuk siklus pembangunan yang saling memperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal tidak hanya memengaruhi ekonomi

pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap



pembangunan sosial dan kesejahteraan manusia (Barrows & Ollivier, 2021; Choi et al., 2023; Selvanathan et al., 2021).

Belanja modal juga berpengaruh terhadap impor, terutama barang-barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi di dalam negeri. Dengan infrastruktur yang memadai, proses impor menjadi lebih lancar dan cepat, memungkinkan perusahaan mendapatkan bahan-bahan penting tanpa keterlambatan signifikan. Hal ini membantu industri lokal mempertahankan produktivitas yang tinggi dan menekan biaya produksi. Pada akhirnya, belanja modal tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga mendukung impor yang stabil dan efisien, sehingga menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

2.2.3 Hubungan Kapasitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Ekspor Impor dan IPM

Kapasitas fiskal merupakan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan melalui berbagai sumber, terutama pajak, guna mendanai belanja negara. Kapasitas fiskal yang kuat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah memiliki pendapatan yang memadai, mereka dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya menjadi pendorong utama

uhan ekonomi. Peningkatan belanja negara dari hasil kapasitas yang baik juga membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif



dan memperkuat sektor-sektor produktif dalam perekonomian (Divino et al., 2020; Hickey et al., 2020; Nwite et al., 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat diperkuat melalui kebijakan fiskal yang ekspansif ketika kapasitas fiskal memungkinkan peningkatan belanja pemerintah. Ketika belanja negara meningkat, khususnya dalam investasi publik, dampak positif terhadap permintaan agregat pun tercipta. Belanja pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik mendorong peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kaharudin & Ab-Rahman, 2022; Lang & Yang, 2019; Saji, 2023).

Dalam konteks perdagangan ekspor-impor, kapasitas fiskal juga berperan dalam memperkuat infrastruktur perdagangan dan logistik. Pemerintah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat mampu membiayai pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalan raya yang mendukung kelancaran perdagangan internasional. Infrastruktur yang baik mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman, sehingga produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar global. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang tinggi memungkinkan peningkatan volume ekspor serta impor barang modal yang diperlukan untuk mendukung industri

egeri (Dunford et al., 2020; Qian et al., 2018; Rehman et al.,



Ekspor barang dan jasa cenderung meningkat ketika kapasitas fiskal negara memadai untuk mendukung industri nasional. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif pajak bagi sektor-sektor industri yang berorientasi ekspor, memperkuat daya saing mereka di pasar internasional. Selain itu, belanja negara yang diarahkan untuk penelitian dan pengembangan juga dapat meningkatkan inovasi di sektor industri, menghasilkan produk-produk bernilai tambah yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang baik secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ekspor negara (Calheiros-Lobo et al., 2023; Defever et al., 2020; Kang et al., 2023).

Impor barang modal dan bahan baku juga terpengaruh oleh kapasitas fiskal. Ketika pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang kuat, mereka dapat mendorong impor barang-barang modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini sangat penting bagi negara yang sedang berkembang, di mana sektor-sektor industri sering kali bergantung pada impor teknologi dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya dukungan fiskal yang memadai, proses impor menjadi lebih mudah dan cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi secara keseluruhan (Albers et al., 2023; Mania & Rieber, 2019; Z. Zhang & Lis, 2020).



apasitas fiskal juga terkait erat dengan peningkatan Indeks gunan Manusia (IPM). Ketika pemerintah memiliki pendapatan

yang cukup, mereka dapat membiayai program-program sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Belanja negara yang difokuskan pada sektor-sektor ini akan memperbaiki indikator-indikator utama dalam IPM, seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang memadai memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang lebih baik (Chernov, 2023; Chipunza & Nhamo, 2023; Fagbemi & Adeoye, 2019).

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh kapasitas fiskal yang kuat juga berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih sehat dan terdidik cenderung lebih produktif, yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan memungkinkan tenaga kerja untuk menguasai keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, sementara kesehatan yang baik memastikan mereka mampu bekerja secara optimal. Hubungan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal tidak hanya berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan (Mason et al., 2020; Mbonigaba & Gbenga Wilfred, 2019; Raskind et al., 2019).



alam jangka panjang, kapasitas fiskal yang memadai
jkinan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kemampuan untuk mengelola utang, menjaga anggaran tetap seimbang, dan membiayai program-program strategis tanpa tergantung pada pinjaman luar negeri memberikan kestabilan makroekonomi yang lebih baik. Stabilitas ekonomi ini penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Dengan kapasitas fiskal yang baik, negara dapat mengelola pengeluaran dan pendapatannya secara efektif, mengurangi risiko defisit anggaran dan ketergantungan pada utang luar negeri (Magazzino et al., 2019; Saji, 2023; Toporowski, 2020).

Kesejahteraan sosial yang meningkat melalui penggunaan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program publik juga membantu memperkuat daya beli masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan kualitas hidup membaik, masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk mengkonsumsi barang-barang, termasuk produk impor. Ini secara tidak langsung meningkatkan kinerja perdagangan impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kapasitas fiskal yang kuat menciptakan efek berantai, di mana peningkatan kesejahteraan sosial mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kapasitas fiskal yang kuat memainkan peran kunci dalam menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui pengelolaan pendapatan negara yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan, dan memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia. Kapasitas fiskal



yang baik tidak hanya berdampak pada ekonomi jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang dalam hal stabilitas sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang optimal adalah landasan penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial sebuah negara

2.2 Tinjauan Empiris

Pengamatan dan pengukuran kesejahteraan masyarakat melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sangat penting karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi hidup masyarakat. IPM membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan pemerintah dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Tanpa pengukuran yang jelas, seperti yang diberikan oleh IPM, pengambilan keputusan akan sulit didasarkan pada data empiris yang akurat, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Hal ini didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang digunakan dalam kajian kesejahteraan masyarakat. IPM terbagi ke dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap



kesejahteraan individu dan kelompok masyarakat. Menurut UNDP, IPM dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup suatu populasi, dengan indikator yang meliputi angka harapan hidup, tingkat melek huruf, serta pendapatan per kapita. Dalam konteks ini, IPM dapat digunakan sebagai indikator makro untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah (Islam, 2020; Prados de la Escosura, 2021; Smits & Permanyer, 2019).

Para ahli mengemukakan bahwa IPM dapat mencerminkan tingkat kesetaraan dalam distribusi akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sen menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap peluang yang memungkinkan individu berkembang. Hal ini sejalan dengan teori kapabilitas yang menekankan bahwa kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dari kekayaan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalani hidup yang bermakna dan produktif. IPM, dalam hal ini, memberikan ukuran holistik tentang kemampuan tersebut, menghubungkan aspek ekonomi dengan kualitas hidup manusia (Fukuda-Parr & Cid-Martinez, 2019; Tengelnd, 2020)

Kesejahteraan masyarakat yang diukur secara konsisten memberikan landasan yang kuat bagi evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan menggunakan IPM, para



dapat melacak perubahan dalam kesejahteraan secara objektif, memungkinkan adanya koreksi atau penyesuaian kebijakan yang

diperlukan. Misalnya, ketimpangan dalam akses pendidikan atau layanan kesehatan dapat segera diidentifikasi dan diatasi dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemantauan kesejahteraan masyarakat tidak hanya penting dalam konteks pengukuran, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh (Tumay, 2021) membahas bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menganalisis data dari 49 negara. Desentralisasi fiskal merujuk pada pemindahan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga otoritas lokal memiliki kontrol lebih besar atas pendapatan dan pengeluaran. Studi ini menyoroti bahwa ketika pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih dalam mengelola pendapatan, mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan layanan publik ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan komponen utama IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara desentralisasi pendapatan dengan IPM, yang mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memberikan lebih banyak kontrol keuangan kepada



daerah, desentralisasi fiskal memberdayakan otoritas lokal untuk menerapkan kebijakan yang secara langsung menargetkan masalah-masalah lokal, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Studi ini memberikan dukungan empiris bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial di tingkat regional.

Studi oleh (Hung & Thanh, 2022) mengeksplorasi hubungan simultan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di tingkat lokal. Dengan otonomi fiskal yang lebih besar, daerah-daerah dapat lebih efisien dalam merespons kebutuhan lokal, meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang menjadi pilar utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Studi ini menemukan bahwa di beberapa negara, desentralisasi fiskal memberikan dampak positif, terutama ketika daerah memiliki kapasitas untuk mengelola pendapatan dan mengalokasikan sumber daya dengan baik.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu menghasilkan peningkatan pembangunan manusia merata. Di beberapa kasus, desentralisasi fiskal dapat lebar kesenjangan antarwilayah, terutama jika daerah-daerah



yang kurang berkembang tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memanfaatkan otonomi fiskal mereka. Ketimpangan fiskal antarwilayah dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan manusia di daerah-daerah yang kurang mampu. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal berpotensi mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, diperlukan strategi yang lebih seimbang untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Studi yang dilakukan oleh (Delgado et al., 2022) membahas dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan sosial di Turki dan Argentina. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal, yang memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial di sistem federal seperti Argentina. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar untuk merespons kebutuhan lokal, meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, studi ini juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kapasitas daerah untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Di negara seperti Turki,



dampak positif dari desentralisasi fiskal kurang terlihat dibandingkan dengan Argentina, yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu memberikan hasil yang sama di semua negara. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam hal sumber daya atau kapasitas administratif, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial, penerapannya harus disertai dengan strategi yang memperhatikan perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah.

Kesejahteraan yang diukur oleh HDI dipengaruhi juga oleh investasi, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi publik dan swasta meningkatkan harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, yang merupakan komponen utama HDI. FDI juga mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan produktivitas, serta memperkuat akses teknologi, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Banyak bukti empiris yang menunjukkan hubungan ini.

Studi yang dilakukan oleh (Thi Cam Ha et al., 2024) membahas bagaimana kualitas institusi mempengaruhi hubungan antara investasi asing langsung (FDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Penelitian ini menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, FDI tidak selalu

ak langsung pada peningkatan HDI. Sebaliknya, kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, transparansi, dan stabilitas hukum,



memainkan peran penting dalam menentukan seberapa efektif FDI dapat meningkatkan pembangunan manusia. Institusi yang baik memungkinkan FDI diinvestasikan secara lebih efisien dalam sektor-sektor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Studi ini juga menemukan bahwa negara dengan institusi yang lemah sering kali tidak dapat memanfaatkan FDI secara optimal. Dalam kondisi ini, aliran modal asing cenderung kurang berkontribusi pada pembangunan manusia karena korupsi, birokrasi yang buruk, atau kurangnya infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kualitas institusi di negara-negara berkembang untuk memastikan bahwa FDI dapat secara langsung mendukung peningkatan HDI, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh (N. H. Khan et al., 2019) mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Pakistan, dengan fokus khusus pada peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), investasi asing langsung (FDI), dan perdagangan. Penelitian ini menemukan bahwa FDI memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan HDI di Pakistan, di mana aliran modal asing berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, transfer teknologi, dan peningkatan

pendidikan serta kesehatan. Dalam konteks ini, FDI dianggap salah satu pendorong utama dalam meningkatkan komponen-



komponen HDI seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci dalam peningkatan HDI. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor penting, sementara perdagangan membantu membuka akses ke teknologi dan sumber daya baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam keseluruhan analisis, penelitian ini menekankan bahwa kombinasi dari FDI, perdagangan, dan ICT memainkan peran sentral dalam mempercepat pembangunan manusia di Pakistan, menjadikan ketiga faktor ini sebagai pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suprpto et al., 2022), menganalisis dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM melalui pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi faktor utama yang mendukung



in indikator-indikator IPM seperti harapan hidup, tingkat an, dan pendapatan per kapita. Temuan ini menunjukkan bahwa

investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran investasi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian Suprpto et al. juga menyimpulkan bahwa investasi berkelanjutan dapat menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini memperkuat pandangan bahwa investasi yang tepat sasaran dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (HDI) karena pola konsumsi mencerminkan akses masyarakat terhadap sumber daya penting seperti pangan, energi, dan barang-barang kebutuhan dasar. Konsumsi yang lebih tinggi, terutama dalam sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan, dapat langsung meningkatkan komponen HDI, seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.



itu, konsumsi yang berkelanjutan dan berkualitas juga ninkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan

dasar warganya, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsumsi yang baik dan merata berkontribusi langsung terhadap peningkatan HDI dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Spada, 2020) membahas hubungan antara konsumsi anggur, Indeks Pembangunan Manusia (HDI), dan wilayah geografis di 45 negara di wilayah WHO Eropa. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsumsi anggur dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup suatu negara. Negara-negara dengan HDI yang lebih tinggi sering kali memiliki tingkat konsumsi anggur yang lebih tinggi, yang menurut penelitian ini, berhubungan dengan gaya hidup dan budaya yang mengedepankan keseimbangan hidup dan kualitas konsumsi. Studi ini menggarisbawahi bahwa konsumsi anggur bukan hanya terkait dengan preferensi minuman, tetapi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang diukur melalui HDI.

Penelitian ini juga menemukan bahwa wilayah geografis memainkan peran penting dalam memengaruhi pola konsumsi anggur. Negara-negara dengan tradisi budaya yang kuat terkait dengan konsumsi anggur, seperti di Eropa Selatan, cenderung memiliki tingkat HDI yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan

negara yang bukan penghasil anggur. Temuan ini menunjukkan konsumsi anggur dapat digunakan sebagai salah satu indikator



tidak langsung dari kesejahteraan dan kualitas hidup dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, konsumsi anggur memiliki hubungan menarik dengan HDI, meskipun penelitian ini mengingatkan bahwa hubungan ini lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-budaya dan ekonomi.

Penelitian oleh (Amer, 2020) meneliti pengaruh konsumsi energi terbarukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di beberapa negara. Studi ini menggunakan data panel dari tahun 1990 hingga 2015 untuk menganalisis hubungan antara konsumsi energi terbarukan dan peningkatan HDI, yang diukur melalui komponen-komponen seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi energi terbarukan memiliki dampak positif terhadap HDI, karena energi yang bersih dan berkelanjutan mendukung kesehatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pengembangan pendidikan dan layanan sosial.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan, yang secara langsung mempengaruhi kesehatan dan harapan hidup. Negara-negara yang meningkatkan konsumsi energi terbarukan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan



sumber daya pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya investasi dalam energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan HDI dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Perdagangan Internasional mempengaruhi kesejahteraan yang diukur melalui HDI dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan dari perdagangan memperkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memperbaiki indikator HDI seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, Perdagangan Internasional memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian oleh (Zehra & Khattak, 2022) mengeksplorasi hubungan antara liberalisasi perdagangan dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif terhadap HDI di kedua kelompok negara tersebut, dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki akses terhadap barang dan jasa, serta

atkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Liberalisasi perdagangan memungkinkan negara untuk lebih terintegrasi dengan



pasar global, yang pada akhirnya memberikan akses terhadap teknologi baru, pengetahuan, dan peluang investasi yang memperkuat pembangunan manusia.

Namun, dampaknya berbeda antara negara maju dan berkembang. Di negara berkembang, dampak positif liberalisasi perdagangan terhadap HDI mungkin lebih lambat karena tantangan struktural seperti infrastruktur yang kurang memadai dan kemampuan institusi yang terbatas. Sebaliknya, di negara maju, liberalisasi perdagangan lebih cepat memberikan manfaat karena infrastruktur dan sistem pendidikan serta kesehatan yang lebih mapan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perdagangan bebas secara umum mendukung peningkatan HDI, setiap negara membutuhkan strategi yang disesuaikan untuk memastikan bahwa liberalisasi perdagangan membawa manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Penelitian oleh (Eid Hassan, 2022) mengeksplorasi bagaimana perdagangan antara negara-negara dengan tingkat HDI yang serupa memengaruhi perkembangan HDI mereka masing-masing. Penelitian ini berfokus pada tren perdagangan antara negara-negara yang berada dalam kategori HDI yang sama, seperti negara-negara dengan HDI tinggi atau menengah. Temuan utama menunjukkan bahwa perdagangan antar negara-negara ini meningkatkan indikator-indikator utama HDI, termasuk



hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Dalam hal ara-negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang

sama cenderung memperkuat satu sama lain melalui pertukaran teknologi, sumber daya, dan produk yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perdagangan antara negara-negara dalam kategori HDI yang sama cenderung lebih stabil dan berkelanjutan karena mereka berbagi pola konsumsi dan produksi yang serupa. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi masing-masing negara tetapi juga mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan HDI. Dengan demikian, perdagangan antara negara-negara dengan level HDI serupa memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mendukung pembangunan manusia secara global.

Kesimpulan dari kajian ini menyoroti peran penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM memberikan gambaran holistik mengenai kualitas hidup individu dan populasi suatu negara, yang menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Berbagai penelitian mendukung bahwa kebijakan berbasis data yang mengacu pada IPM mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan

eraan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahwa alisasi fiskal dan investasi yang tepat dalam sektor-sektor kunci



seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara signifikan berkontribusi pada peningkatan IPM, dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk lebih efektif merespons kebutuhan masyarakat lokal.

Namun, kajian ini juga menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan antarwilayah dalam hal kemampuan fiskal dan kapasitas institusi yang bervariasi. Meskipun desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata di semua daerah. Penting bagi pemerintah untuk mengadopsi strategi yang seimbang agar desentralisasi dan investasi dapat memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kualitas institusi yang baik dan integrasi perdagangan internasional yang efektif juga memegang peran kunci dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.





Optimized using
trial version
www.balesio.com